

# Kalkulasi Koalisi Capres

Oleh Trisno Yulianto



**PERTEMUAN** politik mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menjadi penanda dimulainya upaya pengalangan koalisi politik menjelang pemilu presiden tahun 2019. Koalisi politik memang dibutuhkan untuk memuluskan jalan para politikus mencalonkan diri sebagai capres. Seperti diketahui UU Pemilu yang baru disahkan DPR meski diboikot 4 fraksi menetapkan ambang batas pencalonan presiden (*Presidential Threshold*) sebesar 20%. Dipastikan partai-partai besar seperti Demokrat, Gerindra bahkan pemenang pemilu 2014 PDIP memerlukan langkah koalisi dengan partai lain jika ingin mengusung capres andalannya.

Prabowo Subianto yang telah 2 kali gagal dalam pilpres masih berambisi mencalonkan diri dalam pilpres 2019. Adapun Susilo Bambang Yudhoyono memiliki kepentingan memuluskan karir politik anaknya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam panggung kepemimpinan politik nasional. Potensi duet Prabowo-AHY menjadi kandidat capres-cawapres tahun 2019 terbuka lebar. Namun hal tersebut boleh jadi bisa berubah mengikuti irama dinamika politik nasional. Koalisi Gerindra-Demokrat masih membutuhkan dukungan dari partai lain yang selama ini dianggap sejalan sikap politiknya. PAN dan PKS berpeluang besar masuk dalam koalisi jika diakomodasi kepentingan politiknya. PKS sendiri memiliki daya tawar politik yang menghendaki kader PKS mendampingi Prabowo sebagai cawapres.

Di kubu yang berbeda eks Koalisi Indonesia Hebat (KIH) kemungkinan besar akan kembali mengajukan sosok Joko Widodo sebagai capres. Empat partai yakni Golkar, Nasdem, PPP, Hanura menyatakan siap mengusung Presiden Joko Widodo sebagai capres. Wacana tokoh yang akan mendampingi Jokowi juga santer dipergunjingkan sebagai isu politik. Di antaranya nama Gatot Nurmantyo, Lukman Hakim Saefudin, Puan Maharani. Rivalitas pilpres 2019 diprediksi akan mengerucut pada figur Jokowi yang berhadapan dengan Prabowo Subianto.

Koalisi dalam pilpres sebenarnya hanya memiliki peran signifikan dalam memenuhi kelayakan pencalonan. Tahun 2009 dan tahun 2014 prasyarat pengajuan

Capres-Cawapres adalah minimal didukung oleh partai politik atau koalisi Partai Politik yang memiliki persentase suara di atas angka 20%. Kini sesuai UU pemilu 2017 koalisi parpol pendukung capres minimal harus memiliki persentase suara minimal 20%. Jika blok koalisi pilpres tidak hanya terbelah menjadi dua kelompok, sebenarnya akan ada 3 pasangan capres-cawapres yang maju dalam kompetisi berebut RI-1 tahun 2019.

Namun dalam realitas politik yang paling rasional akan tumbuh kristalisasi dua kelompok kekuatan politik pendukung



capres. Hal

tersebut akan berimplikasi pada pembelahan dukungan politik di tingkat akar rumput yang berwatak diametral. Belajar dari Pilpres 2014 pembelahan politik akibat saling dukung capres menimbulkan sentimentasi kebencian yang belum memudar sampai saat ini. Masyarakat cenderung mudah diprovokasi dengan propaganda politik pilpres yang bernuansa sara. Hal tersebut yang sesungguhnya bertentangan dengan substansi demokrasi elektoral di mana kompetisi harus berlandaskan rasionalitas dan adu program kampanye.

## Berhitung Matematis

Koalisi politik yang akan saling berhadapan di Pilpres 2019 akan berhitung secara matematis. Dari mulai potensi

dukungan masyarakat, kapasitas mesin politik kepartaian, serta jejaring organisasi melawan yang dimiliki oleh partai pendukung. Koalisi pendukung capres akan memulai serangan kampanye negatif jauh sebelum tahapan pilpres dimulai. Tujuannya menurunkan elektabilitas capres yang menjadi lawan politiknya.

Koalisi politik menjelang Pilpres 2019 masih mudah goyah jika tidak ada proses konsolidasi serta tidak menemukan titik kesepakatan politis yang sifatnya pragmatis. Semua parpol peserta pemilu memiliki harapan tentang "kue ekonomi" saat mendukung capres tertentu. Partai politik yang berkoalisi memiliki agenda kepentingan organisasional, faksional ataupun ideologis. Kemampuan bernegosiasi dan saling memahami (*mutual political trust*) yang akan menentukan sebuah koalisi akan solid dalam mengawal dan memenangkan jagoan yang diusung.

Pelajaran dari perhelatan demokrasi elektoral tahun 2004, 2009 dan 2014 menunjukkan realitas politik, yakni: Pertama, koalisi politik yang gemuk dengan terdiri dari banyak partai tidak menjamin kemenangan capres yang diusung. Koalisi hanya menjamin stabilitas politik pemerintahan namun tidak signifikan menentukan keterpilihan calon pemimpin. Tingkat elektabilitas capres dan kepercayaan pemilih terhadap citra dan performa calon yang lebih menentukan.

Kedua, koalisi yang gemuk dengan banyak partai membuka ruang transaksional politik. Politik menjadi arena dagang sapi untuk berebut jatah kursi kekuasaan di kabinet dan parlemen. Koalisi lebih cenderung berwatak pragmatis dan bukannya merealisasikan visi pembaruan di segala bidang. Ketiga, koalisi cenderung cair. Partai yang mendukung capres tertentu boleh jadi suatu ketika tidak akan mendukung kebijakan presiden terpilih demi menjaga citra-popularitas di mata publik.

Lebih ideal saat ini adalah pembangunan koalisi politik berdasarkan rumusan program-program kerja yang terukur dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Sistem demokrasi Indonesia lebih membutuhkan koalisi permanen atas visi kenegaraan yang konstruktif. Dan, bukan sekadar sikap kritis yang *waton.sulaya*.(42)

— Trisno Yulianto, *alumnus FISIP Undip*